

PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA 2024



https://www.pt-yogyakarta.go.id

Jl. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH. Wojo, Bangunharjo, Sewon, Bantul, D.I Yogyakarta





PERJANJIAN KINERJA TAHUN (PKT) 2024



PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

Jl. Prof.Dr. Wirjono Projodikoro, SH., Wojo, bangunharjo, sewon, Bantul Telp. (0274)4396412 Fax. (0274)4396415

Email: pt.yogya@gmail.com Website: pt-yogyakarta.go.id

YOGYAKARTA 55187



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA NOMOR: 17 /KPT.W13-U/SK.RA1.10/I/2024

Tentang PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

KETUA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor
 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka perlu disusun Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Pengadilan Tinggi Yogyakarta;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tentang Penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Pengadilan Tinggi Yogyakarta;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 - Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 - Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
 - Peraturan Presiden Nomor: 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - Peraturan Presiden Nomor: 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 - Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan

Peradilan sebagaiman telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

- 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- 10.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 11.Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: SE/31/M.PAN/12/2014 tentang Penetapan Kinerja serta sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi.

- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkmah Agung RI.
 - 2. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI tertanggal 19 Desember 2023 Nomor: 4107/SEK/OT1.6/12/2023 perihal Penyampaian Dokumen SAKIP

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA Menetapkan

TENTANG PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 PENGADILAN

TINGGI YOGYAKARTA

PERTAMA Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam

lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan

ini.

KEDUA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan

diperbaiki sebagaimana mestinya.

NGGDitetapkan di Rada tanggal

: Yogyakarta

: 2 Januari 2024

ua Pengadilan Tinggi Yogyakarta

YAWAN HARTONO, S.H., M.H.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

NOMOR: 17 /KPT.W13-U/SK.RA1.10/I/2024

TANGGAL : 2 Januari 2024

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, Transparan dan	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%
	Akuntabel	 Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi 	40%
		c. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	95%
2	Peningkatan Efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	100%

Kegiatan		Anggaran	
1.	Program Dukungan Manajemen	Rp. 28.484.233.000	
2.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 162.560.000	

Ditetankan di

: Yogyakarta : 2 Januari 2024

retua Pengadilan Tinggi Yogyakarta

HARTONO, S.H., M.H.

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: SETYAWAN HARTONO, S.H., M.H.

Jabatan

: Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama

: H. BAMBANG MYANTO, S.H., M.H.

Jabatan

: Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Yogyakarta, 2 Januari 2024

Pihak Kedua

rektur Jenderal Badan Reradilan Umum

Pihak Pertama

Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta

BAMBANG MYANTO, S.H., M.H.

SETYAWAN HARTONO, S.H., M.H.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti,	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%
Transparan dan Akuntabel		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	40%
	c. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	95	
2	Peningkatan Efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	100%

Kegiatan		Anggaran	
1.	Program Dukungan Manajemen	Rp. 28.484.233.000	
2.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 162.560.000	

Pihak Kedua

Direktur Jenderal Radan Peradilan Umum

H BAMBANG MYANTO, S.H., M.H.

Yogyakarta, 2 Januari 2024

TING Pihak Pertama

Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta

ETYAWAN HARTONO, S.H., M.H.

